



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Otonomi Daerah

Suatu pemerintahan daerah adalah sebagian dari pada bentuk suatu pemerintahan Negara yang mempunyai daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat untuk prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah menurut azas desentralisasi dan dekonsentrasi.

Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dan yang di maksud dengan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat - pejabatnya di daerah. Untuk itu setiap warga Negara akan mengetahui dimana kedudukannya, apa hak dan kewajibannya di dalam kehidupan bernegara.

Jika kita melihat isi dari undang-undang No.22 tahun 1999 mengenai kewenangan daerah, adanya kewenangan yang diberikan pada daerah, dalam hal ini kabupaten dan kotamadya maka daerah akan lebih mempunyai kewenangan untuk mengoptimalkan potensinya.

Prinsipnya otonomi daerah adalah penataan penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan hierarki dan kesatuan wilayah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan umum maupun pembangunan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah juga akan menuntut aparatur pemerintah yang berkemampuan, sehingga masyarakat secara nyata memperoleh manfaat dari

adanya otonomi itu. Satu hal yang sering dilontarkan sebagai kritik terhadap sistem dan mekanisme kerja pemerintah khususnya pemerintahan daerah adalah birokrasi, rangkaian kerja yang terlalu bertele-tele. Satu pengurusan ijin misalnya, harus melalui berbagai seksi dengan masing-masing selang waktu yang cukup panjang. Belum lagi unsur individu yang semakin menambah ketidakcepatan pelayanan. Hal ini di satu segi justru akan sangat menghambat laju percepatan pembangunan yang tinggi, di segi lain akan memberikan citra yang buruk dari pemerintah di mata masyarakat, yang dengan demikian tidak mendorong satu rasa kebersamaan, saling keterkaitan dan terlebih lagi akan menjadikan masyarakat acuh serta mengabaikan pemerintah. Satu hal yang tidak kita inginkan tentunya.

Sebagai fasilitas berlangsungnya pemerintahan di daerah maka kantor Kabupaten Daerah Tingkat II mempunyai tujuan dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipimpin oleh seorang Bupati kepala daerah.

Agar pemerintahan di daerah dapat berlangsung diperlukan unsur-unsur manajemen yang akan melayani masyarakat secara administratif maupun operasional. Kemudian untuk memperoleh efisiensi kegiatan kerja, pelayanannya perlu didukung oleh organisasi pemerintahan, personil, peralatan dan wadah kegiatan yang efisien.

Dengan demikian, sejalan dengan proses percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, birokrasi yang bertele-tele harus semakin di hilangkan, agar hal ini dapat menumbuhkan satu rasa kebersamaan dari rakyat pada pemerintah. Demikian pula halnya dengan kota Lubuk Linggau Kabupaten Dati II Musi Rawas, di dalam perkembangannya hingga saat ini memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting.

1.1.2. Relokasi Kantor Pemerintahan Daerah Tingkat II Musi Rawas

Dengan adanya otonomi daerah kabupaten Musi Rawas mengalami pemekaran wilayah yang terbagi menjadi dua pemerintahan yaitu pemerintahan kota dan pemerintahan kabupaten, yang mana pemerintahan kota dipimpin oleh walikota sedangkan pemerintahan kabupaten dipimpin oleh bupati. Dengan keluarnya Undang-Undang No.7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, maka Kota Lubuklinggau yang selama ini berkedudukan sebagai Ibukota Kabupaten Musi Rawas, telah berdiri sendiri sebagai Pemerintahan Kota Lubuklinggau yang otonom. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan memindahkan pusat pemerintahan secara bertahap keluar dari kota Lubuklinggau.

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas No.7/SK/1999 tentang Usul Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Musi Rawas ke wilayah Kecamatan Muara Beliti dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas No.08/KPTS/DPRD/2004 tentang Persetujuan Usul Nama Ibukota dan Lokasi Pusat Pemerintahan, maka Pusat Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang baru adalah di desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti.

Karena kantor bupati yang lama terletak di wilayah pemerintahan kota maka pemerintahan kabupaten membutuhkan kantor baru dan berencana untuk memindahkan kantor Kabupaten Dati II ke wilayah kabupaten yang terletak di kecamatan Muara Beliti.

Kantor Bupati baru yang dimaksud penulis adalah kantor yang dalam tahap perencanaan pembangunan disini kantor Bupati yang baru itu yang dijadikan perancangan dalam Tugas Akhir penulis.

1.2. Permasalahan

Umum :

1. Bagaimana mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai keterpaduan pelayanan pada masyarakat dengan pembangunan kantor pemerintahan kabupaten daerah tingkat II Musi Rawas.
2. Bagaimana konsep kantor Kabupaten Dati II Musi Rawas yang memperhatikan kenyamanan termal melalui penghawaan dan pencahayaan alami

Khusus :

1. Bagaimana merencanakan atau mendesain suatu kantor pemerintahan Kabupaten Dati II Musi Rawas untuk mencapai efisiensi dengan memanfaatkan lokasi site untuk mendapat kan kondisi kenyamanan termal di dalam bangunan.
2. Bagaimana menampilkan bentuk fisik bangunan kantor Kabupaten Dati II Musi Rawas melalui orientasi massa bangunan, lansekap, dan tata ruang dalam pencapaian kenyamanan termal melalui penghawaan alami dan pencahayaan alami.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

1. Memberikan alternatif desain kantor pemerintahan kabupaten Dati II Musi Rawas didalam pembangunan Kantor kabupaten yang baru yang sedang dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah setempat, kedalam suatu uraian proses perancangan fisik yang didasarkan pada pengkajian kondisi yang ada.

2. Untuk mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan kantor Kabupaten Dati II Musi Rawas dengan memperhatikan kenyamanan termal para pengguna.

Sasaran :

mencapai kenyamanan termal melalui penghawaan alami dengan menentukan orientasi masa bangunan, lansekap, dan tata ruang dalam.
mencapai kenyamanan termal melalui pencahayaan alami dengan merancang unsur-unsur bukaan.

1.4. Keaslian Tugas Akhir

Untuk menunjukkan keaslian penulisan tugas akhir ini diambil langkah dengan meninjau dan membandingkan dari beberapa hasil tugas akhir lain yang mengambil judul yang sama yakni tentang kantor Pemerintahan Daerah Tingkat II. Judul tugas akhir yang dijadikan bahan perbandingan itu adalah sebagai berikut :

1. “Relokasi Kantor Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi” oleh Dessy Herpani- 94340101
 - Permasalahan Umum
Relokasi Kantor Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi optimasi dan keterpaduan pelayanan pada masyarakat.
 - Permasalahan Khusus
 - a. pemilihan lokasi yang dekat dengan daerah arahnya sehingga mempermudah jangkauan pelayanan pada masyarakat.
 - b. Pola tata ruang yang mempresentasikan keterpaduan pelayanan pada masyarakat
 - c. sistem sirkulasi yang mendukung pelayanan yang optimal.
2. “Kantor Kabupaten Dati II Musi Banyuasin – Sekayu Sumatera Selatan” oleh Ery Susandah- 1994
 - Permasalahan Non Arsitektural (soft ware/ non teknis)

Bagaimana meningkatkan hasil guna dan daya guna dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang citra kota.

- Permasalahan Arsitektural (hard ware/ teknis)
 - a. Bagaimana merencanakan / merancang suatu kompleks pemerintahan Kabupaten Dati II Musi Banyuasin menjadi pusat orientasi warga kota baik secara simbolis maupun fungsional, melalui ungkapan tata ruangnya.
 - b. Bagaimana menampilkan bentuk fisik bangunan kantor bupati sebagai salah satu prioritas utama wadah kegiatan pemerintahan Dati II Musi Banyuasin, yang sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dapat memberikan citra sebagai pusat pemerintahan yang sebenarnya.

1.5. Lingkup Pembahasan

Lingkup wilayah yang dibahas adalah Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Dati II Musi Rawas yang di Relokasi dari wilayah Kota Lubuk Linggau ke wilayah Kabupaten yang terletak di kecamatan Muara Beliti Baru. Serta pembahasan dibatasi pada permasalahan yang dihadapi Kantor Kabupaten Dati II Musi Rawas yaitu Perancangan Kantor Kabupaten Yang Baru yang dapat menaungi segala kegiatan pelayanan dan perijinan bagi masyarakat.

1.5.1. Batasan pembahasan konsep kenyamanan termal

Faktor pembentuk kenyamanan termal dari konsep bangunan tropis (respon bangunan terhadap kondisi iklim) terdiri atas dua bagian yaitu klimatologis dan non klimatologis, namun demikian pembentukan kenyamanan tersebut tidak dapat berdiri sendiri secara independen tanpa mempengaruhi

satu sama lain, sehingga pada analisis dan konsep bangunan tropis pada kantor bupati kelak meski hanya akan memfokuskan pada respon bangunan terhadap sinar matahari dan angin juga tetap mempertimbangkan faktor – faktor lain terutama yang berkaitan terhadap respon sinar matahari dan angin

Pembentuk Kenyamanan Termal	Pembahasan	Konsep	Hal Yang Terkait
Suhu	Standar kenyamanan suhu lingkungan terhadap pengguna bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Upaya memperoleh suhu yang sesuai misalnya melalui penghawaan buatan 	<ul style="list-style-type: none"> Saling bergantung dengan faktor radiasi, angin, kelembapan, aktivitas, dan pakaian. Terkait terutama dengan radiasi, dan respon terhadap angin
	Material <ul style="list-style-type: none"> Jenis material Absorptivitas, konduktivitas, resistivitas Penerapan material 	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan dan penempatan material di dalam bangunan atau site Konsep gubahan massa 	
	Gubahan massa (bentuk ragam bangunan) dan penutup bangunan		
	Relation with soil <i>Ground cover, ground slope dan elevation</i>		Berkaitan erat dengan lokasi, kelembaban, dan <i>landscaping design</i>

Radiasi sinar matahari	Standar kenyamanan pencahayaan terhadap fungsi bangunan	Besaran bukaan yang disarankan untuk memperoleh kenyamanan pengelihatn dan penerangan alamiah (<i>daylighting</i>).	
	Penyelidikan terhadap sinar jatuh matahari terhadap site / bangunan	Orientasi bangunan, penataan massa - massa	Juga berhubungan dengan ventilasi (bukaan untuk penghawaan)

	Perlindungan terhadap sinar matahari	Ragam bentuk perlindungan terhadap sinar matahari	Juga memperhatikan respon terhadap kondisi angin, dan penataan lansekap
Angin	Standar kenyamanan angin terhadap bangunan	Modifikasi dan pengaturan karakteristik angin (kecepatan dan arah angin dalam bangunan), penataan massa – massa dalam site.	Berkaitan dengan faktor suhu terutama mengenai penataan lansekap, radiasi sinar matahari, kelembapan aktifitas dan pakaian.
	Penyelidikan perilaku angin dominan terhadap site		
	Ventilasi : <ul style="list-style-type: none"> • Aspek pokok perancangan bukaan (bentuk, letak, dimensi, dll) • Persyaratan dan perhitungan matematis • Pengaruh ventilasi terhadap kenyamanan pencahayaan dan penghawaan 	Konsep bukaan pada bangunan	Berhubungan dengan sinar matahari, (kebutuhan dan perlindungan) dan curah hujan.
Kelembapan	Standar kenyamanan kelembapan	Menciptakan kelembapan sesuai standar kenyamanan termal yang disyaratkan	Berkaitan dengan suhu, radiasi sinar matahari, angin, aktivitas, dan pakaian.
	Pembahasan faktor pembentuk kelembapan antara lain curah hujan, angin dan sinar matahari		
Aktifitas	Penyelidikan energi yang dipergunakan untuk melakukan suatu aktifitas		
Pakaian	Analisis terhadap pakaian yang sesuai untuk lingkungan dan aktivitas tertentu		

1.6. Metode Pembahasan

Metode yang digunakan dalam menyusun pendekatan pemecahan permasalahan serta konsep perencanaan dan perancangan ini adalah :

1.6.1. Metode Pengamatan (*observasi*)

Dalam tahap ini gagasan yang akan diambil berdasarkan :

- a. Isu- isu yang ada yaitu bahwa lokasi atau kedudukan Kantor Kabupaten Dati II Musi Rawas tidak berada pada wilayah Kabupaten sehingga Kantor Kabupaten Musi Rawas akan dipindah kan ke wilayah Kabupaten Yang Terletak di Kecamatan Muara Beliti Baru.
- b. Informasi yang berupa data- data dari kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Rawas, dan kantor Cipta Karya.

1.6.2. Analisa

Untuk menuju kepada konsep perencanaan dan perancangan kantor Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas akhir, Kenyamanan Termal melalui Penghawaan alami dan pencahayaan alami di kaitkan dengan teori yang diperoleh dari literatur- literatur.

1.6.3. Sintesa

Untuk menuju kepada konsep perencanaan dan perancangan kantor Pemerintahan Kabupaten Dati II Musi Rawas akhir, lokasi, kegiatan serta keruangan yang telah dianalisa, disimpulkan untuk mendukung pada proses perancangan berikutnya.

1.8. Sistematika Penulisan

a. Bab I

Pendahuluan, mengungkapkan latar belakang, permasalahan, tujuan, sasaran, keaslian penulisan, lingkup bahasan, metode pembahasan, sistematika penulisan, dan pola pikir.

b. Bab II

Tinjauan Kantor Pemerintahan Kabupaten Dati II Musi Rawas, meliputi susunan organisai jabatan Bupati, Kebutuhan Ruang, Besaran Ruang.

c. Bab III

Tinjauan terhadap Kenyamanan Termal yang meliputi, sinar Matahari dan Angin

d. Bab IV

Analisis Kantor Pemerintahan Kabupaten Dati II Musi Rawas

e. Bab V

Analisis Kenyamanan Termal yang meliputi, sinar matahari dan arah angin

f. Bab VI

Mengemukakan Konsep Perancangan Kantor Pemerintahan Kabupaten Tingkat II Musi Rawas degan penekanan konsep pada kenyamanan Termal yang meliputi Sinar Matahari dan Angin